


VERBAL


- | | | | |
|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Bappeda Litbang | 4. Diterima di penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | | 6. Diketik oleh | : Bappeda Litbang |
| 2. Diperiksa Oleh | : Bagian Hukum | 7. Dita'lik oleh/Dikaji | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima di pengiriman Surat | : Bappeda Litbang |
| | | 9. Dikirim oleh | : Bappeda Ltbang |
| 3. Diedarkan oleh | : Bappeda Litbang | 10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh | : Bagian Hukum |

DIMAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisnis Di Pemerintahan Kota Bima Tahun 2021

Kota Bima, 2021

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekertaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bappeda Litbang Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah maka perlu ada pedoman penyusunan peta proses bisnis di Pemerintah Kota Bima dalam rangka membangun tatalaksana penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bima, belum terdapat peta proses bisnis bagi unit organisasi dalam

implementasi program dan kegiatan secara lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI PEMERINTAH
KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
7. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah;
8. Daerah adalah Kota Bima.
9. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.

BAB II

PRINSIP –PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. definitif, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang;
- c. pelanggan, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus mempunyai penerima hasil proses;
- d. nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yaitu suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yaitu suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yaitu mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana;
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan agar setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah dalam mengkomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 4

Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu

Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Djangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyusun Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada peta proses bisnis tingkat daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Peta Proses Bisnis Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup proses pekerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan

dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kecamatan dikoordinasikan oleh sekretaris masing masing Perangkat Daerah.
- (5) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (6) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Rumah Sakit Daerah dikoordinasikan oleh pejabat yang membidangi ketatausahaan.
- (7) Proses penyusunan Peta Proses Bisnis pada Bagian Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi Ketatalaksanaan;

BAB V

TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. tahap persiapan dan perencanaan;
 - b. tahap pengembangan;
 - c. tahap penerapan;
 - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan sebagai berikut:
 - a. Level 0 : Visi dan Misi;
 - b. Level 1 : Sasaran Daerah;
 - c. Level 2 : Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. Level 3 : Program;
 - e. Level 4 : Aktivitas/kegiatan.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Daerah menggunakan level 0 dan level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja menggunakan level 2 sampai dengan level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e.

- (5) Hasil penyusunan Peta Proses Bisnis dengan menggunakan level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambar peta sebagai berikut:
- a. peta proses;
 - b. peta subproses;
 - c. peta hubungan;
 - d. peta lintas fungsi.
- (6) Rincian tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Rincian mengenai level atau tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rincian gambar peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pengembangan Peta Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 10

Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keorganisasian melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 657

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS DI
PEMERINTAH KOTA BIMA.

RINCIAN TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam pemerintah daerah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di tingkat Daerah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

1.1. Pengumpulan informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapat melalui proses wawancara langsung ke penanggungjawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggungjawab proses. Perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses. Serta alat ukur yang bisa

digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis adalah informasi yang terkait dengan *supplier*, *input*, *proses*, *output* dan *customer*.

Teknik analisa terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kausal: telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- b. Klasifikasi proses: memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- c. Pemodelan proses: pembuatan rumusan tatalaksana dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

1.2. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan proses bisnis antara lain :

- a. seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim reformasi birokrasi internal (RBI) masing-masing tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dipimpin oleh pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- b. secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representative, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0 sampai dengan level 4) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi dan lintas fungsi.

2.1 Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan

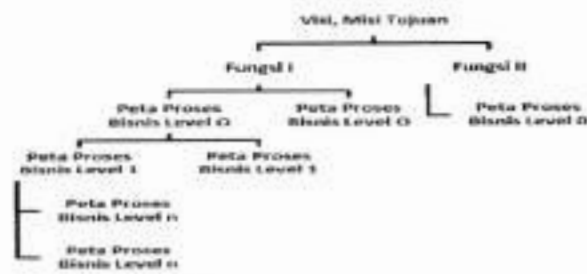
Peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi dan sasaran yang kemudian diturunkan dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Tahapan untuk penyusunan Peta Proses Bisnis di dalam Tingkat Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan sasaran.
- b. mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi serta sasaran.
- c. setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat

digambarkan sebagai berikut ini :



Gambar 1
Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta Proses Bisnis yang dimiliki Tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0 sampai dengan peta proses bisnis level 4, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Tingkat Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi dan misi yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a). proses inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal tingkat Daerah;
- berpengaruh langsung terhadap keberhasilan tingkat Daerah dalam mencapai visi, dan misi;

- memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

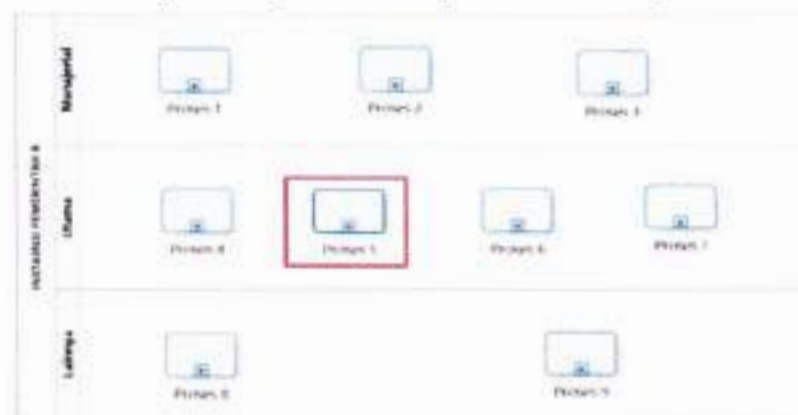
b) proses pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

c) proses lainnya

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai sasaran Tingkat Daerah.



Gambar 3
Contoh Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level 2

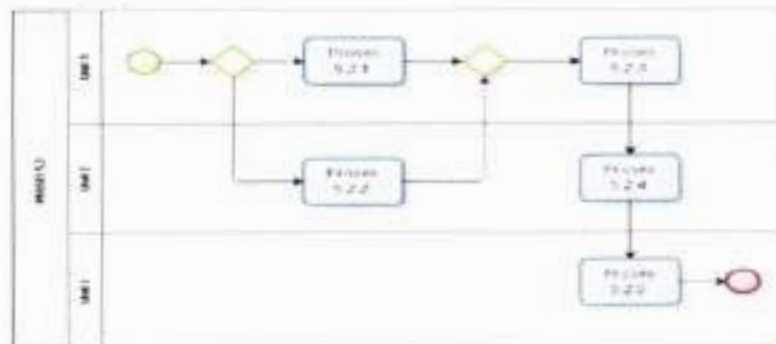
merupakan penjabaran dari sasaran Tingkat Daerah yang dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. Level 3

merupakan penjabaran dari program Tingkat Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada rencana strategis.

e. Level 4

merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 3.



Gambar 4
Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

2.2 Penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subprocess, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan sasaran Tingkat Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

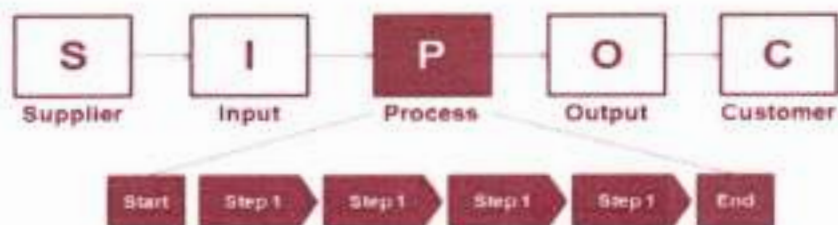
a. Peta Proses

1) Identifikasi peta proses:

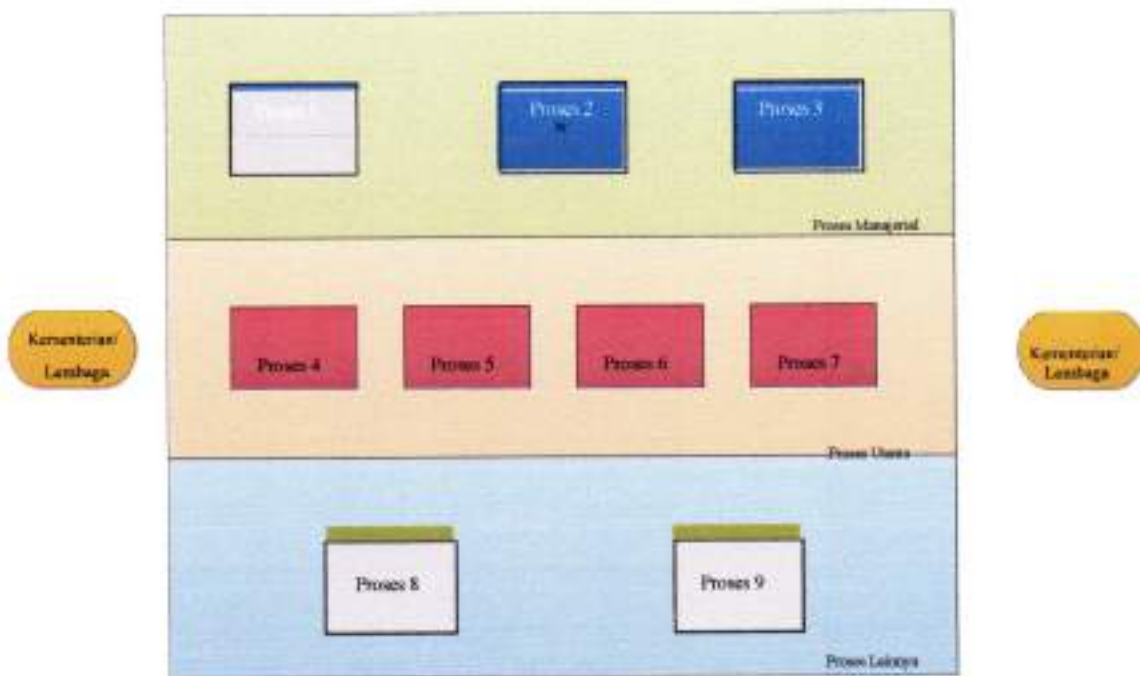
- a) untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
- b) sesudah identifikasi proses inti berikutnya

adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;

- c) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- 3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



4) Finalisasi peta proses



Gambar 5

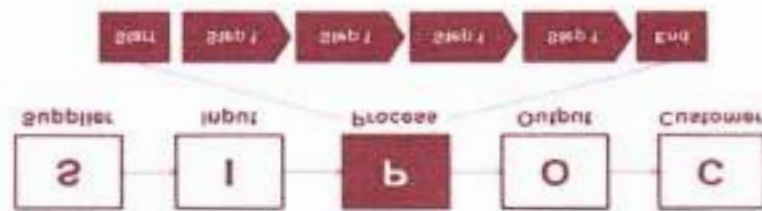
Contoh Peta Proses Bisnis

b. Peta Sub-Proses

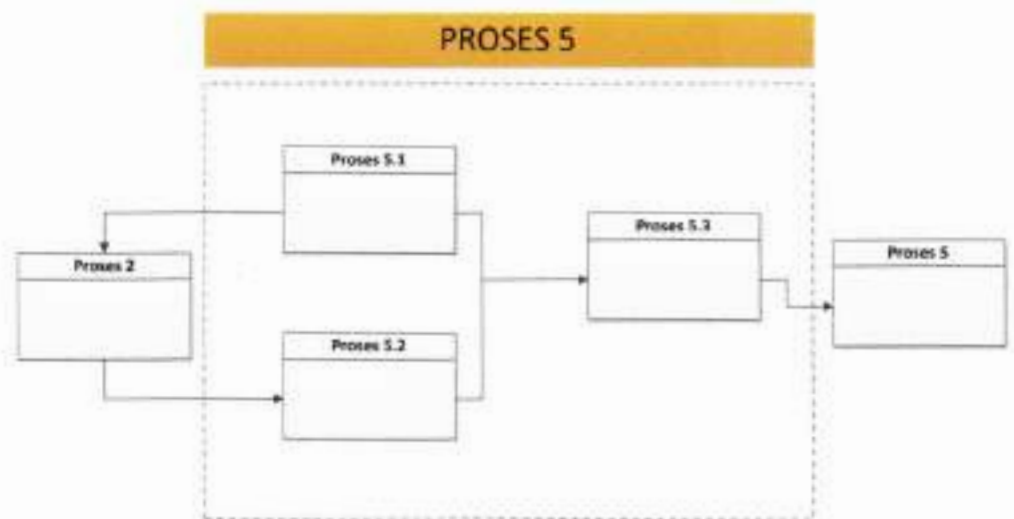
1). Identifikasi peta subproses:

- a) untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b) lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub business proses, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya;
- 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
 - 3) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-*

Input- Process-Output Customer (SiPoC).



- 4). Finalisasi peta subprocess dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



c. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- 1) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subprocess;

- 2) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.

d. Peta lintas fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan *roles*/peran;

- 2) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	

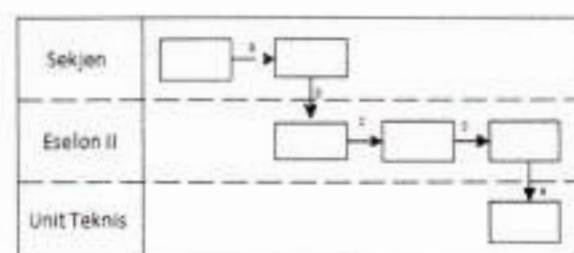
- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing- masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

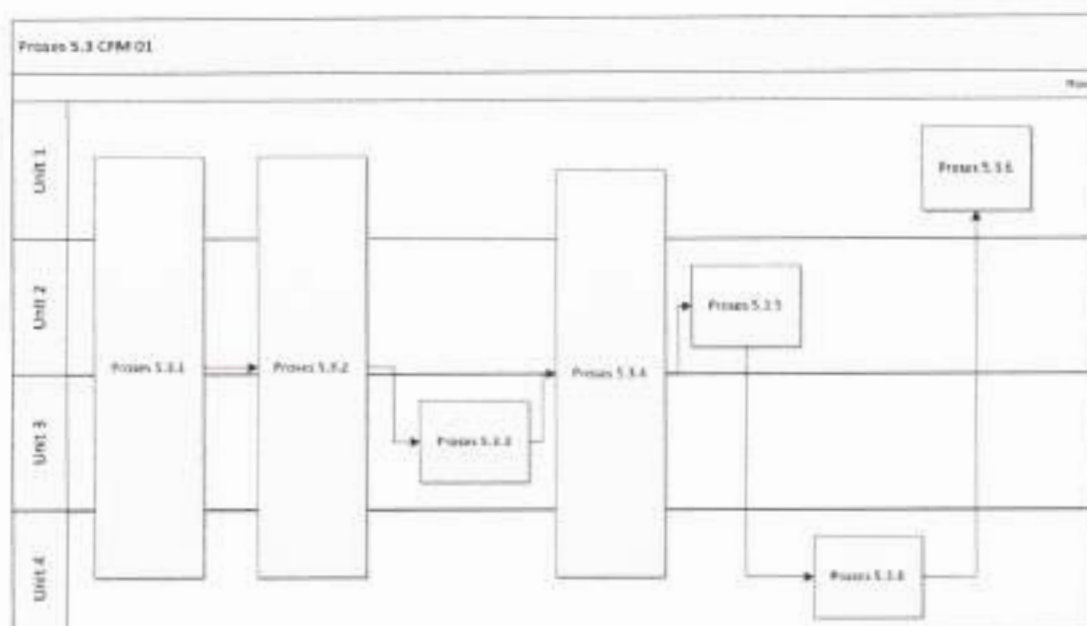
Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 4) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait;

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Eselon II		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Unit Teknis				<input type="text"/>	

beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;





3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi :

a. Pengesahan Peta Proses Bisnis

- 1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
- 2) pimpinan tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis

- 1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hardcopy* dan *softcopy*; dan
- 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis

- 1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
- 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit

organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

d. Perubahan Peta Proses Bisnis

- 1) perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja (visi, misi, dan sasaran yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah);
- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis tingkat Daerah dan tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA
 PROSES BISNIS DI PEMERINTAH KOTA
 BIMA.

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 PADA RPJMD

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penyusunan dan penyajian peta proses bisnis level 0 dan level 1 RPJMD, disajikan peta proses bisnis RPJMD KOTA BIMA TAHUN 2018-2023 sebagai contoh.





Logframe Sasaran 1

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

(Indikator : Angka Harapan Hidup)

PROSES UTAMA

PROSES
PENDUKUNG

Pelayanan Kesehatan

DINAS KESEHATAN

Sasaran:
Pelayanan kesehatan masyarakat meningkat

1. Program pemenuhan upaya kesehatan pencegahan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

1. Penyediaan layanan kesehatan
2. Penerbitan stiker pemberian pada makanan jajanan dan serta makanan jajanan
3. Advokasi, pemberdayaan, pembinaan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah lokal kabupaten

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas POKB

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan
2. Program Peningkatan Pendidikan
3. Program Rintisan Berencana

Ketersediaan Farmasi, alkes dan sarpras kesehatan

Dinas Kesehatan

Program alkes farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan

PROSES BISNIS

SASARAN 2

LAB 1

PROSES 1 (KUALITAS SDM DAN BERDAYA SAING)

MANAJEMEN

UTAMA

PENDUKUNG

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN
ORGANISASI, TATA
LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

AKSES PENDIDIKAN

PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN
KURIKULUM

PENGEMBANGAN KUALITAS
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN

MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS
PENDIDIKAN

SASARAN 2:

2. Persentase BPR/LKM Aktiif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil

Tabel 2.240
Jumlah BPR/LKM

No	Variabel	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit						
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit						
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit						
	Jumlah	Unit						

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Tabel 2.241
Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Indikator	Satuan	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	unit						
Jumlah seluruh UKM	unit						
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%						

4. Nilai Omset UKM Yang Dibina

Indikator yang menjelaskan mengenai perkembangan nilai omset UKM pada tahun n-2 dan n-1

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya

CROSS CUTTING

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	98,29%	98,56%	99,29%	99,79%	100%	100%
Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	23,17%	25,17%	27,1%	29,17%	31,17%	33,17%

Sasaran Dasar	Aspek	Perangkat Dasar
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan	Pendidikan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan Inklusif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; DIPA; Dinas Sosial
	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penguatan Data dan Informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Statistik ; Dinas Tenaga Kerja
	Pengembangan Budaya Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan
	Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Perhubungan ; Dinas Olahraga ; Dinas Tenaga Kerja

Logframe Sasaran 2

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

(Indikator : Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan)

AKSES PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sasaran: Akses meningkat terhadap pendidikan meningkat

Program Pengelolaan pendidikan

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas PISA

Program pengelolaan pendidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, Program pengendalian perilaku pendidik

Program pemenuhan hak anak, Program perlindungan khusus anak

Pengembangan kurikulum

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program pengembangan kurikulum

Pengembangan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pendidik dan tenaga Kependidikan

Pengembangan Perpustakaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program pembinaan perpustakaan

PROSES BISNIS

SASARAN 3

PROSES 1 (KUALITAS SDM DAN BERDAYA SAING)

MANAJEMEN

UTAMA

PENDUKUNG

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENGUATAN EKONOMI

PENGEMBANGAN WIRAUUSAHA BARU

STABILISASI HARGA

MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT

LEVEL 1

SASARAN 3:

CROSS CUTTING

Sasaran 3 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Pengeluaran Per Kapita (Rp.000/ora)	1.350	1.390	1.400	1.500	1.600	1.700

Pengembangan Wirausaha Baru

Penguatan Ekonomi

Stabilitas Harga

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah 2019 - 2020	Perangkat Daerah 2021-2023
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Penguatan ekonomi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan&perikanan; dan Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan&perikanan; dan Dinas Tenaga Kerja
		Pengembangan wirausaha baru	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas P3A; dan Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas P3A; dan Dinas Tenaga Kerja
		Stabilitas Harga	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; dan Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian; dan Dinas Tenaga Kerja

Logframe Sasaran 3

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

(Indikator : Pengeluaran Per Kapita)

PENGUATAN EKONOMI

DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Sasaran:
Kualitas belanja masyarakat meningkat

1. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro
3. Program pengalihan dan pemasaran hasil pertanian
4. Program peningkatan dan pembasgasan

Pengembangan wirausaha baru

Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas P3A

Program pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro; program pengembangan UKM; program pendirian dan bina usaha perkotaan

Program pengalihan hasil pertanian gender dan pemberdayaan perempuan

Stabilitas Harga

Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan

Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

PROSES BISNIS

SASARAN 4

PROSES 1 (KUALITAS SDM DAN BERDAYA SAING)

MANAJEMEN

UTAMA

PENDUKUNG

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGLOLAAN
ORGANISASI, TATA
LAKSANA DAN SDM

PENGLOLAAN SISTEM
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

PEMBANGUNAN
KESEHATAN

PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN

PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

LEVEL 1

SASARAN 4:

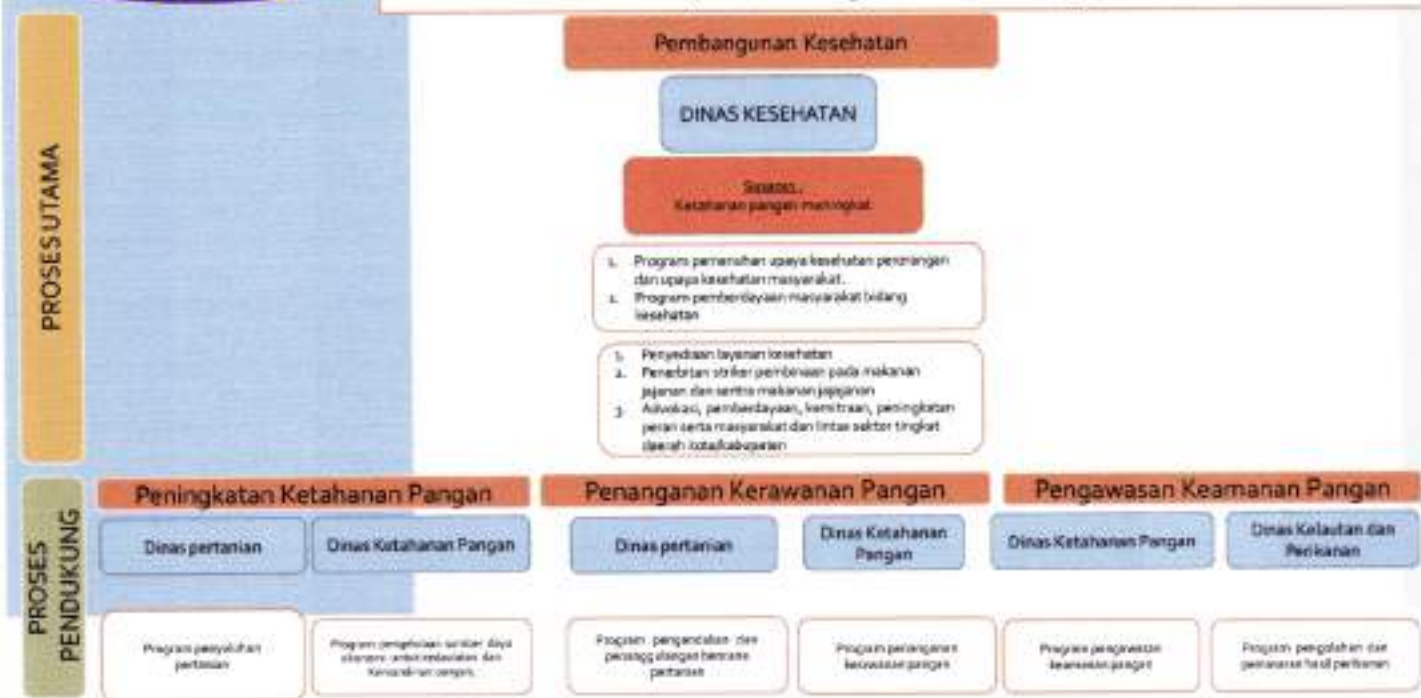
MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka ketahanan pangan	80,9	83,3	84,3	85,3	86,3	87,3
Sasaran Daerah	Aspek		Perangkat Daerah			
Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian			
	Pembinaan Pola Konsumsi Pangan		Dinas Ketahanan Pangan			
	Penguatan Distribusi Pangan		Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Koperasi			
	Pembinaan Keamanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Kesehatan			
	Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Koperasi; Dinas Tenaga Kerja; DP3A; DP2KB; Badan Riset; 5 Kecamatan			

Logframe Sasaran 4

Meningkatnya Ketahanan Pangan
(Indikator : Angka Ketahanan Pangan)



PROSES BISNIS

SASARAN 5

LEBEL 1

PROSES 2 (EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN)

MANAJEMEN

UTAMA

PENDUKUNG

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR JASA PARIWISATA

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

STABILITAS KEAMANAN

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

SASARAN 5:

CROSS CUTTING

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	5,8	3	3,3	3,6	3,9

Sasaran Dasar	Aspek	Pemangku Daerah
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Ekonomi Sektor Jasa Pariwisata	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan
	Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	Peningkatan Ekonomi Sektor Industri	Dinas Koperasi dan Perdagangan
	Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanian	Dinas Pertanian
	Peningkatan Ekonomi Sektor Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Infrastruktur	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, DUK
	Perizinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPR
	Stabilitas Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Ekonomi Sektor Jasa Pariwisata

Stabilitas Keamanan

Perizinan dan penanaman Modal

Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan

Peningkatan Ekonomi Sektor Industri

(Indikator : Angka Pertumbuhan Ekonomi)



CROSS CUTTING

Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Kemiskinan (%)	8,79	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2

Sasaran Daerah	Angka	Pemangku Daerah
Kemiskinan masyarakat miskin	Perimbangan Sosial	Dinas Sosial
	Instansi Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Instansi Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Infrastruktur Pemukiman	Dinas PUPK, Dinas PKP, Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Menengah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Penguatan Data dan Informasi	Dinas Data dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Perspektif, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi
	Program TSPK	Buana, 5 Kecamatan

Peningkatan kesejahteraan keluarga

Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar

Perlindungan dan jaminan sosial

Pemberdayaan sosial masyarakat

Logframe Sasaran 6

Mnurunnya Angka Kemiskinan

(Indikator : Angka Kemiskinan)

PROSES UTAMA

AKSES MASYARAKAT MISKIN TERHADAP KEBUTUHAN DASAR

DINAS SOSIAL

Sasaran:

Akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar meningkat dan memperluas peranganan PMKS

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program Rehabilitasi sosial

PROSES PENDUKUNG

Peningkatan kesejahteraan keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan (KSI)

Pemberdayaan sosial masyarakat

Dinas Sosial

Keramatan

Program pemberdayaan sosial

Program pemberdayaan masyarakat dan informasi

Perlindungan dan jaminan sosial

Dinas Sosial

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Program perlindungan dan jaminan sosial

Program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan



Logframe Sasaran 7

Meningkatnya Kesempatan Kerja (Indikator : Tingkat Pengangguran)

PROSES UTAMA

Peningkatan angkatan kerja dan wirausaha baru

DINAS TENAGA KERJA

Sasaran 1
Menurunkan pengangguran

1. Program pemecatan tenaga kerja
2. Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

PROSES PENDUKUNG

Penyediaan tenaga kerja terampil

Dinas Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja, Program Hubungan Industrial

Peningkatan akses permodalan

Bagian Ekonomi Setda

Program penanaman dan pembangunan

PROSES BISNIS

SASARAN 8

LAB 1

PROSES 3 (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)

MANAJEMEN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

UTAMA

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET

MANAJEMEN ASN

PENGUATAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

PENGUATAN DAN PENGAWASAN

PERATURAN PERUNDANGAN

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK

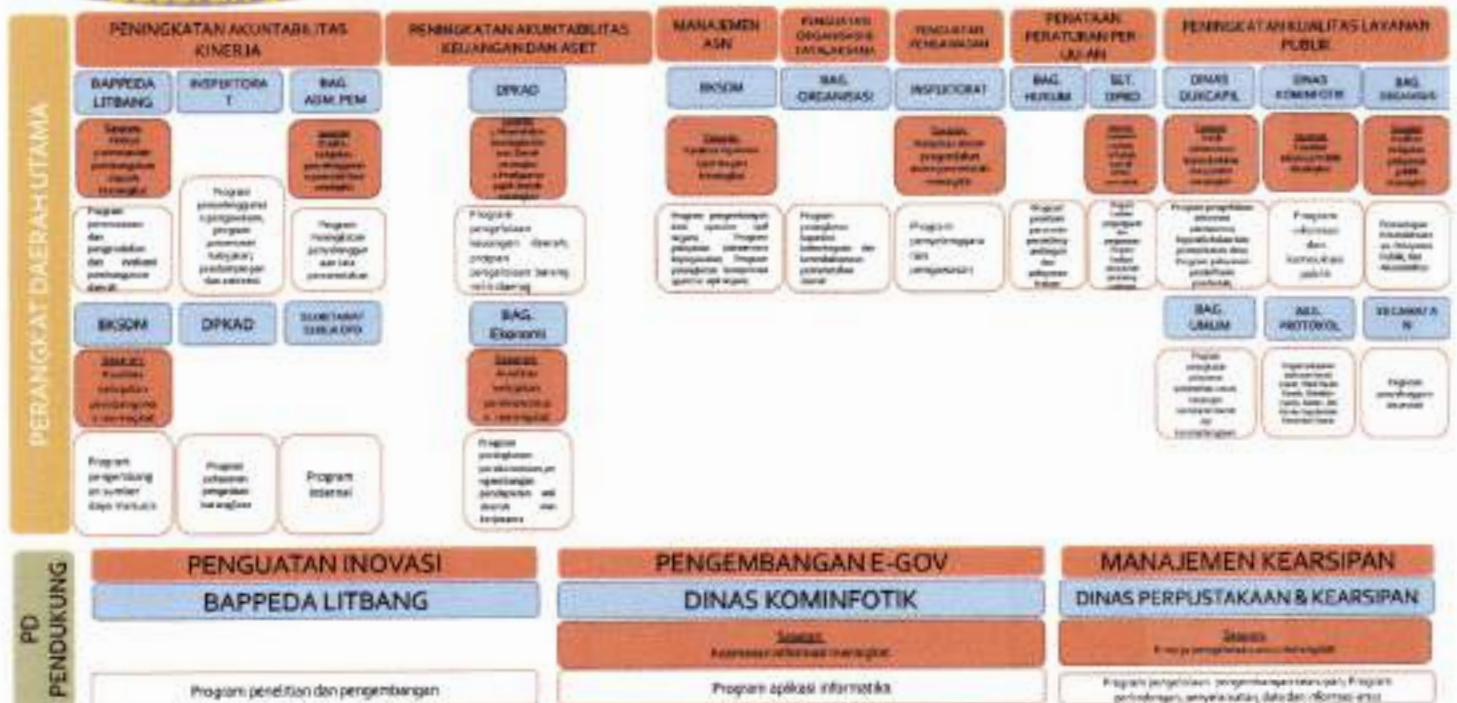
PENDUKUNG

PENGUATAN INOVASI

PENGEMBANGAN E-GOV

MANAJEMEN KEARSIPAN

SASARAN 8:
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



CROSS CUTTING

Sasaran 9 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan (%)	5,56	5,7	5,72	5,82	5,92	6,03
Sasaran Daerah	Aspek		Penanggung Jawab			
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Tenaga Kerja		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan anggota Koperasi dan pelaku UMKM		Dinas Koperasi			
	Peningkatan produktivitas petani dan nelayan		Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DPSS, DP2KB, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kecamatan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, 5 Kecamatan, Dinas PUPB			
	Peningkatan investasi		DPMPTSP, Bagian Ekonomi Senda, Bag AP Setda			

CROSS CUTTING

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Rata-rata Skor IKM	84,64	84	85	86	87	88
Sasaran Daerah	Aspek		Penanggung Jawab			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Publik		Dinas Dinkes, Dinas PUPB, Dinas DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kearsifan, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Koperasi, 5 Kecamatan			
	Penguatan Inovasi		Bappeda Lings, Bagian Organisasi			
	Pengembangan E-Gov		Dinas Kearsifan			



Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas PUPR
	Pelaksanaan Tata Ruang	Dinas PUPR; Dinas PGO; DPMPTSP; Dinas Lingkungan Hidup
	Pengawasan Tata Ruang	Dinas PUPR; DPMPTSP; Satpol PP; Dinas Lingkungan Hidup
	Penguatan Sistem Informasi Geospasial	Dinas PUPR; Bappeda Lirisang

**Logframe
Sasaran 11**

MENINGKATNYA KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG
(Indikator : Persentase Kesesuaian Tata Ruang)



PROSES BISNIS

SASARAN 12



Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,41	80	84	85	86	87
Aspek		Pemerintah Daerah				
Kualitas lingkungan hidup meningkat	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPR; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPR				
	Pemberdayaan Masyarakat	Kelas Kemitraan; 5 Kecamatan; Dinas PUPR; Dinas Lingkungan Hidup				

Logframe Sasaran 12

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
(Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)





CROSS CUTTING

Sasaran 13 : Kualitas Infrastruktur Daerah Meningkat

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Indeks Infrastruktur Wilayah (%)	31,45	38,81	40	41	42	43

Sasaran Daerah	Aspek	Peningkat Daerah
Infrastruktur wilayah meningkat	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Desas PUPR, Desas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Infrastruktur Perumahan	Desas PUPR, Desas PSP
	Peningkatan Infrastruktur Perhubungan	Desas Perhubungan
	Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan	BPBD, Desas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Partisipasi Masyarakat	1 Kecamatan

Infrastruktur Wilayah/Daerah

Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Peningkatan Infrastruktur Perumahan

Peningkatan Infrastruktur Perhubungan

Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan

Partisipasi Masyarakat

Logframe Sasaran 13

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAERAH

(Indikator : Indeks Infrastruktur Wilayah)



PROSES BISNIS

SASARAN 14

LEVEL 1

PROSES 4 (INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)

MANAJEMEN

UTAMA

PENDUKUNG

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN SDM

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

KESIAPSIAGAAN

TANGGAP DARURAT

REHAB REKON

PARTISIPASI MASYARAKAT

MENINGKATNYA KETAHANAN TERHADAP BENCANA

SASARAN 14:

CROSS CUTTING

Sasaran 14 : Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Indeks Ketahanan Bencana	83	84	85	86	87	88

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Ketahanan terhadap bencana meningkat	Ketahanan terhadap bencana	BPBD; Satuan Pol PP.
	Kesiapsiagaan	BPBD; Satuan Pol PP.
	Tanggap Darurat	BPBD; Satuan Pol PP; Dinas Sosial
	Rehab rekon	BPBD; Satuan Pol PP; Dinas Sosial
	Partisipasi Masyarakat	Kecamatan

Logframe
Sasaran 14

MENINGKATNYA KETAHANAN TERHADAP BENCANA

(Indikator : Indeks Ketahanan Bencana)





CROSS CUTTING

Sasaran 15 : Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan ketertiban

Ketenteraman & Ketertiban

Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya Penindakan (Represif)

Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Angka Kriminalitas (%)	20	25	30	35	40	45
Persentase penurunan angka konflik sosial (%)	11,2	12,5	14,3	16,7	20	25

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Upaya Pencegahan (Preventif)	Satpol PP ; Badan Kesbangpol; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Sosial ; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; Bag. Kesra; Kecamatan
	Upaya Penindakan (Represif)	Satpol PP
	Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesbangpol ; Kecamatan

Logframe Sasaran 15

Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (Indikator : Angka Kriminalitas & Persentase penurunan angka konflik sosial)



PROSES BISNIS

SASARAN 16



LEVEL 1

CROSS CUTTING

Sasaran 16 : Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Indikator	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Persentase Peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi (%)	1,1	2,1	3,2	4,2	5,3	6,3

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Penguatan Budaya Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Pariwisata
	Pendidikan Muatan lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
	Partisipasi masyarakat	Kecamatan

Logframe Sasaran 16

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BUDAYA LOKAL
(Indikator : Persentase Peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi)





CROSS CUTTING

Sasaran 17 : Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama

Indikator	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Indeks kerukunan umat beragama	83	84	85	86	87	88

Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Peningkatan Kebebasan Beragama	Bag. Kesra
	Pengamalan Ajaran Beragama	Bakesbangpol; Bag. Kesra
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Bakesbangpol; Bag. Kesra; Kecamatan Masyarakat

**Logframe
Sasaran 17**

Meningkatnya Pengamalan Ajaran Agama
(Indikator : Indeks Kerukunan Umat Beragama)

PENINGKATAN KEBEBASAN BERAGAMA

BAG. KESRA

Sasaran:
Masyarakat dan lembaga beragama

Program Pemertahanan dan
Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Fasilitas
penghiburan Bina Mental
Spiritual

PENGAMALAN AJARAN BERAGAMA

BAGIAN KESRA

Program pemertahanan dan
kesejahteraan rakyat

BAKESBANGPOL

Program Pembinaan dan
Pengembangan ketahanan
Ekstrem, Sosial dan Budaya

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

KECAMATAN

Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

WALIKOTA BIMA, *N*

Muhammad Lutfi
MUHAMMAD LUTFI

97 ✓

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
BIMA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS DI PEMERINTAH KOTA
BIMA.

PENYAJIAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Menjelaskan tentang uraian pentingnya setiap unit organisasi menyusun peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi dan digambarkan sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana strategis organisasi.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Menjelaskan maksud penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah sebagai acuan bagi setiap Bidang, seksi, dan sub bagian untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menjelaskan tujuan penyusunan peta proses bisnis seperti sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan

ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

III. RUANG LINGKUP

Menjelaskan ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

BAB II TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Menjelaskan kaitan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan Visi Misi Daerah serta menjabarkan uraian tugas pokok dan fungsi organisasi seperti contoh berikut ini.

VISI				
"MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN MANDIRI"				
MISI:				
MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKUALITAS DAN RAMAH, MELALUI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2		3	4
Indeks ketahanan daerah	1	Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pencegahan terhadap bencana	1 Peningkatan kemandirian masyarakat	1 Pembentukan dan Pengembangan kelurahan tangguh
				2 Pembentukan Sekolah aman bencana dan fasilitas umum lainnya
		2	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan dengan Mengembangkan kearifan lokal	1 Pengembangan budaya sadar bencana
				2 Integrasi Program dengan SKPD terkait
				3 Integrasi Perencanaan dengan RTRW

			untuk adaptasi bencana		
			Peningkatan Profesionalisme SDM	1	Diklat dan Penyuluhan bagi Tim PB
				2	Sertifikasi SDM
			Peningkatan Sistim Informasi rawan bencana	1	Pengembangan sistim peringatan dini
				2	Penyusunan Peta rawan bencana
				3	Penyebarluasan informasi potensi bencana
	2	Persentase wilayah yang telah diintervensi upaya pencegahan krisis air	1 Pengembangan wilayah mitigasi struktural	1	Pembuatan Sumur Resapan
				2	Pengelolaan air hujan sebagai alternatif air bersih
	3	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana	1 Peningkatan sistim tatakelola logistik dan peralatan yang memadai	1	Meningkatkan manajemen Logistik dan Peralatan
				2	Pengadaan Sarana Prasarana penunjang kedaruratan bencana sesuai standar minimal
			2 Pembangunan sistim penanganan darurat secara cepat , efektif dan efisien	1	Penyusunan Rencana kontigensi
				2	Pengembangan pusdalops
				3	Uji Renkon dengan Gladi tanggap darurat secara berkala
	4	Tercapainya upaya pemulihan sarana prasarana fisik, ekonomi dan sosial pasca bencana	1 Peningkatan koordinasi RR pasca bencana	1	Penyusunan Rencana aksi Rehab dan Rekon
				2	Peningkatan Koordinasi Pemulihan RR lintas sektor (Dinas terkait, BNPB, Kementerian terkait)
				3	Pemulihan Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik Pasca Bencana

Sumber:

Uraian tugas pokok dan fungsi disusun berdasarkan Peraturan Walikota Bima yang mengatur tentang struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

BAB III PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah yang antara lain adalah:

1. **Definitif**, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. **Urutan**, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. **Pelanggan atau pengguna layanan**, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. **Nilai tambah**, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. **Keterkaitan**, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. **Fungsi silang**, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. **Sederhana representatif**, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. **Konsensus subyektif**, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB IV TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas/aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu